

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pertama dari penelitian ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dari penelitian yang dilakukan peneliti. Berikut akan dijelaskan secara lebih lengkap mengenai pendahuluan dalam penelitian ini.

1.1. Latar Belakang

Hidup dalam kesejahteraan adalah keinginan semua manusia, namun hanya beberapa orang saja yang dapat merasakan hal tersebut. Setiap manusia memiliki modal yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan, modal ini biasa disebut sebagai sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus memiliki kemampuan sehingga dalam persaingan global saat ini mereka memiliki daya saing yang tinggi serta menjadi SDM yang berkualitas agar peluang untuk meningkatkan potensi yang dimiliki semakin besar. Indikator yang mengukur kualitas manusia serta skala ekonomi dalam suatu negara yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mendefinisikan mengenai hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya yang dapat diakses oleh penduduk. Pada tahun 1990 United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan IPM dan dipublikasikan dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR) secara berkala. Menurut UNDP pembangunan manusia merupakan “*enlarging the choice of people*” atau peningkatan taraf yang akan dicapai dan memperluas pilihan pada masyarakat.

Beberapa faktor penting yang kita ketahui dalam pembangunan manusia adalah faktor kesehatan dan pendidikan, dua hal tersebut sangat penting karena merupakan suatu kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar potensi yang dimiliki dapat ditingkatkan. IPM menjadi tolak ukur keberhasilan serta dapat menjadi acuan di masa yang akan datang dalam perencanaan pembangunan (Faqihudin, 2010).

Indonesia terdapat 34 provinsi, di mana dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun setiap provinsi mengalami peningkatan mengenai angka IPM dimana IPM ini menggunakan metode baru serta indikator yang lebih tepat dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah sehingga bisa mendapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi, namun terdapat 5 provinsi yang mendominasi memiliki angka IPM yang cukup rendah bila dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Provinsi yang memiliki angka IPM yang rendah tersebut antara lain Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Data IPM 5 provinsi tersebut dijabarkan melalui Tabel 1.1 berikut ini

Tabel 1. 1
Indeks Pembangunan Manusia 5 Provinsi di Indonesia

No	Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sulbar	60,63	61,01	61,53	62,24	62,96	63,60	64,30	65,10	65,73	66,11
2	NTB	62,14	62,98	63,76	64,31	65,19	65,81	66,58	67,30	68,14	68,25
3	NTT	60,24	60,81	61,68	62,26	62,67	63,13	63,73	64,39	65,23	65,19
4	Pabar	59,90	60,30	60,91	61,28	61,73	62,21	62,99	63,74	64,70	65,09
5	Papua	59,90	55,55	56,25	56,75	57,25	58,05	59,09	60,06	60,84	60,44

Sulbar : Sulawesi Barat.

Pabar : Papua Barat.

NTT : Nusa Tenggara Barat.

NTB : Nusa Tenggara Timur.

Sumber: (BPS, 2021).

Papua menempati posisi terendah, meskipun mengalami kenaikan namun pergerakannya cukup lambat. Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 Papua memiliki nilai IPM sebesar 59,90 dan hingga tahun 2020 nilai IPM tertinggi hanya mencapai 60,84. Hal itu menunjukkan bahwa 5 provinsi tersebut perlu untuk meningkatkan pembangunan dalam aspek ekonomi dan pembangunan yang merata.

Upaya dalam meningkatkan pembangunan manusia kepada 5 provinsi tersebut dapat dilihat melalui bagaimana pemerintah masing-masing daerah menggunakan pendapatan daerahnya untuk menunjang pembangunan manusia seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Negara Indonesia memberlakukan UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang diberikan wewenang dalam mengatur dan mengurus pemerintahan agar dengan cepat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan pemerintahan yang diberikan langsung kepada setiap daerah, tentunya setiap daerah mengandalkan pendapatan daerahnya masing-masing. Jika pendapatan yang dihasilkan suatu daerah semakin tinggi, maka daerah tersebut mampu memenuhi serta membiayai keperluan masyarakat (Christy & Adi, 2009).

Sumber-sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah yang pertama yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD berpengaruh terhadap IPM (Afif & Yulianti, 2018) dan pengaruh PAD cukup besar terhadap IPM (Saswatata & Parju, 2022). Pendapatan daerah memiliki korelasi yang positif dan cukup kuat terhadap IPM yang artinya penambahan pada pendapatan daerah dapat meningkatkan angka IPM (Juliarini, 2018). PAD yang diterima pemerintah daerah berarti daerah tersebut memiliki cukup dana untuk belanja daerah pada sektor-sektor

yang mendukung peningkatan IPM seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur (Hobrouw, Suaryana, & Putri, 2021).

Adapun yang tergolong dalam PAD yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sumber penerimaan yang kedua adalah Dana Alokasi Umum (DAU), dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam menentukan DAU untuk suatu daerah Kabupaten/Kota itu berdasarkan perkalian jumlah DAU dengan porsi daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan di dalam APBN sesuai porsi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan (Afrizal & Maulida, 2011) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2006 tentang DAU agar memprioritaskan penggunaannya guna meningkatkan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat seperti untuk kesejahteraan pegawai, kegiatan koperasi gaji dan tunjangan pegawai kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana. DAU berpengaruh terhadap IPM sehingga menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi dalam membiayai kegiatan daerah (Irianto, Kisnawati, Istiarto, & HELMIDA, 2021).

Selanjutnya, sumber penerimaan yang ketiga adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut (Ndadari dan Adi, 2008) yang dikutip oleh (Harahap, 2011) DAK sama halnya dengan belanja pembangunan karena mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik seperti pembangunan pada sarana dan prasarana publik, peningkatan pada pelayanan publik seperti, pembangunan rumah sakit, pembuatan irigasi, jalan, dan air bersih. DAK berpengaruh meningkatkan IPM (Renggo, 2019) dan DAK berpengaruh terhadap IPM melalui alokasi pembiayaan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menjadi prioritas yang telah ditetapkan pemerintah pusat khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan (Wijaya, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 5 Provinsi Di Indonesia Tahun 2011-2020”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana pengaruh PAD terhadap IPM 5 provinsi di Indonesia tahun 2011 sampai 2020.

- 2) Bagaimana pengaruh DAU terhadap IPM 5 provinsi di Indonesia tahun 2011 sampai 2020.
- 3) Bagaimana pengaruh DAK terhadap IPM 5 provinsi di Indonesia tahun 2011 sampai 2020.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel PAD terhadap indeks pembangunan manusia 5 provinsi di Indonesia tahun 2011 sampai 2020.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel DAU terhadap indeks pembangunan manusia 5 provinsi di Indonesia tahun 2011 sampai 2020.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel DAK terhadap indeks pembangunan manusia 5 provinsi di Indonesia tahun 2011 sampai 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap :

- 1) Pemerintah, sebagai salah satu referensi pemerintah untuk melihat pengaruh PDRB, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia 5 provinsi di Indonesia.
- 2) Pembaca/Peneliti lainnya, sebagai salah satu referensi dalam meneliti yang berkaitan dengan riset ini agar hasil risetnya dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya.
- 3) Peneliti, manfaat penelitian yang dilakukan adalah peneliti dapat menerapkan ilmu selama belajar di perkuliahan, membantu mengembangkan wawasan baik

dalam penyusunan laporan penelitian serta menambah pengetahuan terhadap suatu wilayah tertentu.

1.5. Hipotesis penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dibahas pada bagian sebelumnya, maka dapat disusun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Diduga PAD berpengaruh terhadap IPM menurut 5 provinsi di Indonesia tahun 2011-2020.
- 2) Diduga DAU berpengaruh terhadap IPM menurut 5 provinsi di Indonesia tahun 2011-2020.
- 3) Diduga DAK berpengaruh terhadap IPM menurut 5 provinsi di Indonesia tahun 2011-2020.
- 4) Diduga PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama berpengaruh terhadap IPM menurut 5 provinsi di Indonesia tahun 2011-2020.

1.6. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab I, terdapat penjelasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dari penelitian yang dilakukan peneliti.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai referensi pustaka dari penelitian terdahulu, landasan teori, serta model yang akan digunakan peneliti sebagai acuan dalam mengerjakan skripsi.

Bab III Metodologi Penelitian

Hal-hal yang dibahas pada bab ini berkaitan dengan sumber data, tahapan analisis, metode analisis, dan alat analisis data, serta definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini dimuat secara rinci mengenai hasil penelitian berdasarkan alat analisis yang digunakan sesuai dengan topik penelitian. Kemudian, terdapat pembahasan mengenai hasil dari penelitian secara teori dan statistik. Dari hasil dan pembahasan tersebut maka dapat diketahui tercapai atau tidak, tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Bab V Penutup

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut diambil berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh. Selain itu terdapat saran yang relevan, yang bisa dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya.